



**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP
KAB. KUTAI
KARTANEGARA**



LKJIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



0811- 5506 – 900



dpmpptsp@mail.kukarkab.go.id



Jalan : Woltermonginsidi
Tenggarong Kode Pos 75511



MAL PELAYANAN PUBLIK
KUTAI KARTANEGARA



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/ kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disajikan masih jauh dari sempurna, sehingga kami selaku penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun, Semoga dapat bermanfaat bagi DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kutai Kartanegara, Februari 2025
Kepala

Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kutai Kartanegara,



ALFIAN NOOR, SE., M. LING.

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19690113 199503 1005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Dasar Hukum.....	2
III. Tugas dan Fungsi.....	3
IV. Permasalahan dan Isu Strategis.....	4
V. Uraian Singkat Organisasi.....	7
VI. Sumber Daya Manusia.....	11
VII. Sarana Prasarana.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	35
I. Perencanaan Strategis.....	37
II. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah.....	37
III. Tujuan dan Sasaran.....	37
IV. Indikator Kinerja Utama.....	38
V. Rencana Kerja Tahunan.....	40
VI. Strategi.....	43
VII. Arah Kebijakan.....	55
VIII. Program.....	55
IX. Perjanjian Kinerja.....	56
X. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	64
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	78
I. Capaian Kinerja.....	78
II. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya.....	79
III. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	82
IV. Perbandingan Antara Realisasi Investasi Kab. Kukar dengan Kabupaten/ Kota lainnya.....	85
V. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya.....	87

VI. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	87
VII. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	90
VIII. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.....	91
IX. Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya.....	95
BAB IV PENUTUP.....	120
I. Kesimpulan.....	120
II. Perbaikan Kedepan.....	121
LAMPIRAN.....	viii

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pemetaan Permasalahan.....	5
Tabel 2. Daftar Aset tetap Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024.....	12
Tabel 3. Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	39
Tabel 4. Tujuan/ Sasaran Strategis DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara 2021-2026.....	40
Tabel 5. IKU (Indikator Kinerja Utama) DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.....	42
Tabel 6. Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024.....	44
Tabel 7. Strategi dan Arah Kebijakan.....	53
Tabel 8. Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024.....	55
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	57
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tambahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024.....	57
Tabel 11. Perbandingan Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2024 Dengan Data Awal Tahun 2023 dan Target Tahun 2024.....	63
Tabel 12. Program Kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran (APBD) Tahun 2024.....	65
Tabel 13. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	79
Tabel 14. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan 2023.....	80
Tabel 16. Tindak Lanjut atas LHE Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.....	80
Tabel 17. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	86

		Halaman
Gambar 1.	Keterkaitan Permasalahan utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.....	5
Gambar 2.	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	9
Gambar 3.	Struktur Organisasi DPMPTSP Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021.....	10
Gambar 4.	Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024.....	11
Gambar 5.	Komposisi Non- ASN Berdasarkan Tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024.....	12
Gambar 6.	Loket Layanan Terpadu Satu Pintu.....	20
Gambar 7.	Layanan Costumer Servis.....	21
Gambar 8.	Layanan POLRES DAN Layanan SAMSAT.....	22
Gambar 9.	Layanan Dinas Transmigrasi & Ketenagakerjaan, dan Layanan Imigrasi.....	23
Gambar 10.	Layanan Pajak, Layanan Pegadaian dan Layanan Kantor Pertanahan.....	24
Gambar 11.	Layanan BPJS Ketenagakerjaan, PDAM Tirta Mahakam dan Pengadilan Agama.....	25
Gambar 12.	Layanan Pengadilan Negeri, Layanan DISDUK CAPIL, Layanan Kantor Pos dan Kejaksaan Negeri.....	26
Gambar 13.	Layanan Perbankan (Bankaltimtara dan BRI).....	29
Gambar 14.	Pojok Baca Digital.....	29
Gambar 15.	Ruang Bermain Anak.....	30
Gambar 16.	Ruang Laktasi.....	31
Gambar 17.	Layanan Pengaduan.....	32
Gambar 18.	Layanan Aksesibilitas.....	32
Gambar 19.	Alat cetak Mandiri.....	33
Gambar 20.	Ruang Tunggu.....	33
Gambar 21.	Ruang pernikahan/ Kantor Urusan Agama.....	34
Gambar 22.	Penerimaan Penghargaan 2024.....	88
Gambar 23.	Survey Masyarakat dan Jumlah Kunjungan 2024.....	89
Gambar 24.	Pendampingan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan capaian Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna terselenggaranya *good governance* di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan disusunnya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan :

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada yang memberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai Upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan kinerja;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didalam menjalankan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

III. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan program prioritas antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Peningkatan Promosi Penanaman Modal;
- c. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

IV. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan yang dirumuskan harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kutai Kartanegara sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni: ***“Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara”***. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut. (1.) Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik; (2.) Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia; (3.) Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat; (4.) Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah; (5.) Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah; dan (6.) Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup. Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.
Keterkaitan Permasalahan utama dengan Permasalahan Pokok
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026



Daya Tarik investasi suatu daerah akan tinggi salah satunya jika terdapat kemudahan dalam pelayanan perizinan, dengan pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan melayani maka akan terjadi percepatan Penanaman Modal pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dibutuhkan aparatur yang professional, standar prosedur yang jelas dan biaya pelayanan yang pasti. Menjawab tantangan untuk mencapai pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan kepastian biaya, diperlukan kerja keras dan dukungan semua pihak. Dalam hal ini perlu adanya pembenahan kualitas dan motivasi aparatur pelaksanaan pelayanan tersebut.

Sebagai identifikasi awal terdapat beberapa permasalahan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta factor-factor yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Iklim Investasi Penanaman Modal di Kutai Kartanegara.
2. Kurang Optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan.

Tabel 1.
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya Iklim Investasi Penanaman Modal di Kutai Kartanegara	Belum Optimalnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Belum adanya Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. - Belum tersedianya Data dan Peta Potensi Investasi Menuju Sektor Hilir
		Kurang Optimalnya Promosi Penanaman Modal	Belum Efektifnya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
		Belum Optimalnya Pengendalian Penanaman Modal	Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
		Belum Optimalnya Pengelolaan Data dan Penggunaan Sistem Informasi dalam Penanaman Modal	Belum Optimalnya Pengolahan, Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non-Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	Kurang Optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan	Belum efektifnya Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal	Belum Efektifnya Layanan Konsultasi dan Pengaduan Perizinan dan Non-Perizinan

Isu- isu Strategis

Perumusan isu strategis Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2021- 2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Kutai Kartanegara yang telah diinventarisasi setiap permasalahan yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara periode pembangunan 2021- 2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh;
2. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan dampaknya;
4. Pengembangan perekonomian berkelanjutan;
5. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
6. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah;
7. Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan;
8. Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi).

Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun kedepan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis, lingkungan global yang kita hadapi bersama. Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu isu- isu strategis yang harus mendapat perhatian antara lain:

1. Peningkatan kinerja kelembagaan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal;
3. Peningkatan konsistensi pelayanan penanaman modal;
4. Penyajian data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang terintegrasi secara elektronik;
5. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

V. Uraian Singkat Organisasi

Dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bersama seluruh unsur pendukung pemerintahan lainnya maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara akan siap memberikan pelayanan prima. Melalui berbagai arah kebijakan, strategi, program hingga implementasinya pada kegiatan setiap tahun diharapkan akan tercipta iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif, terwujudnya iklim investasi yang menarik dan kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat daya saing dengan daerah lain dan daya tarik tersendiri bagi investor sehingga Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah tujuan utama investasi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

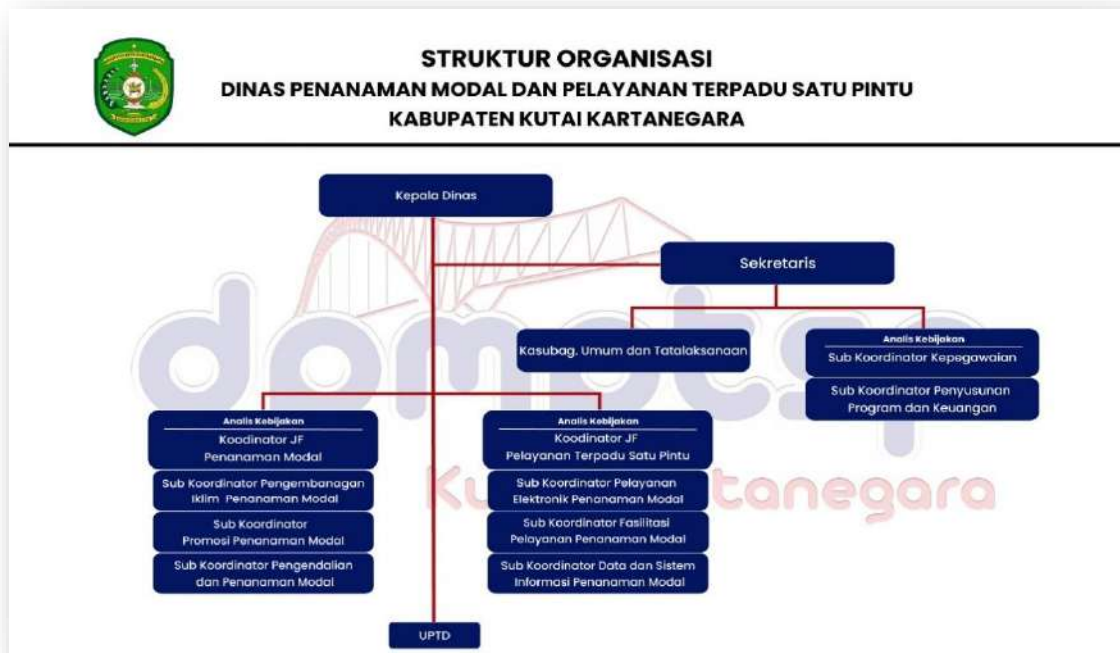
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi pokok:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Penyusunan laporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambar 2.
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP



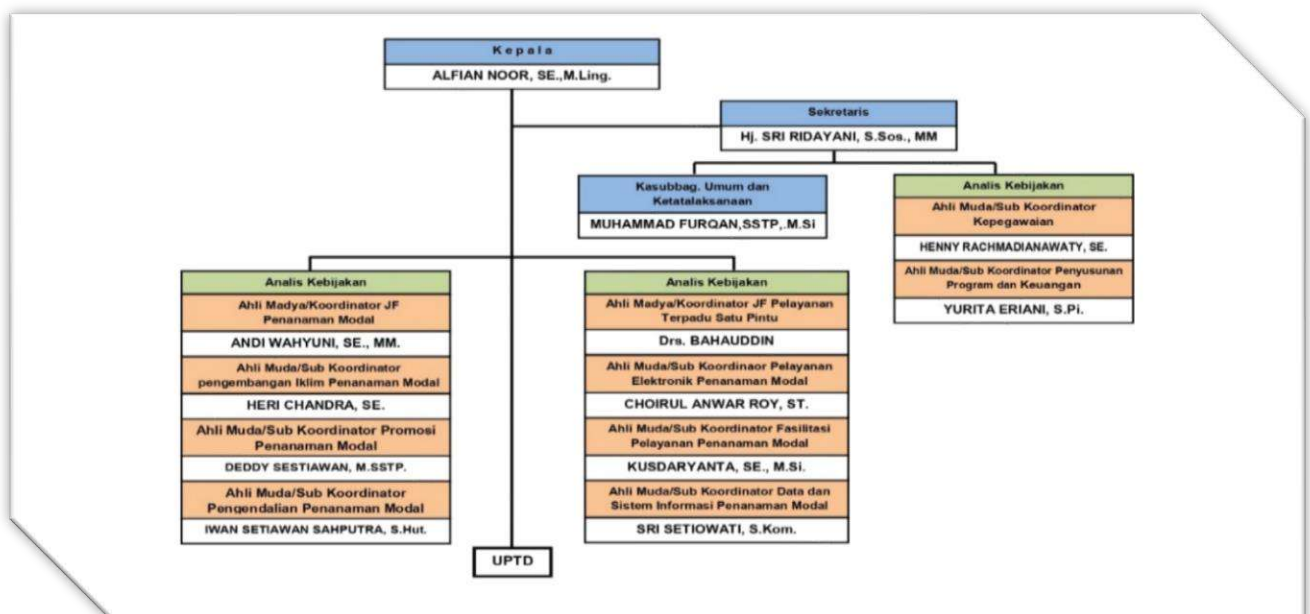
Sumber : Umum dan Tatalaksana, DPMPTSP 2024

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Tatalaksana;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Kepegawaian dijabat Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan dijabat oleh Perencana Ahli Muda.
- c. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Madya, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Pengembangan Iklim Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda.

- d. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Pelayanan Elektronik Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Fasilitas Pelayanan Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional selaku Sub Koordinator Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dijabat oleh Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Gambar 3.
Struktur Organisasi DPMPTSP
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 76 Tahun 2021



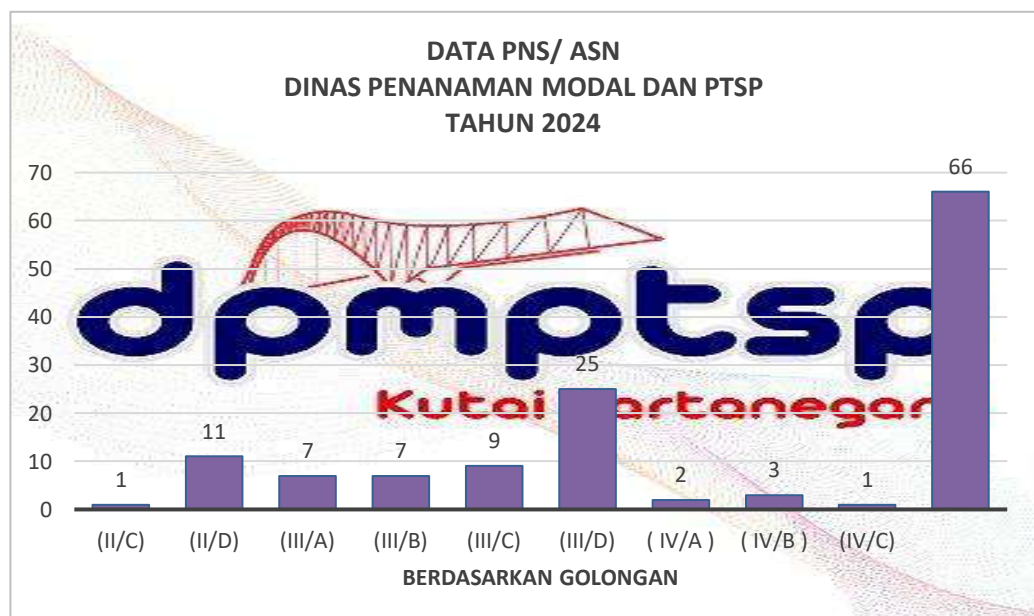
Sumber : Umum dan Tatalaksana, DPMPTSP 2024

VI. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

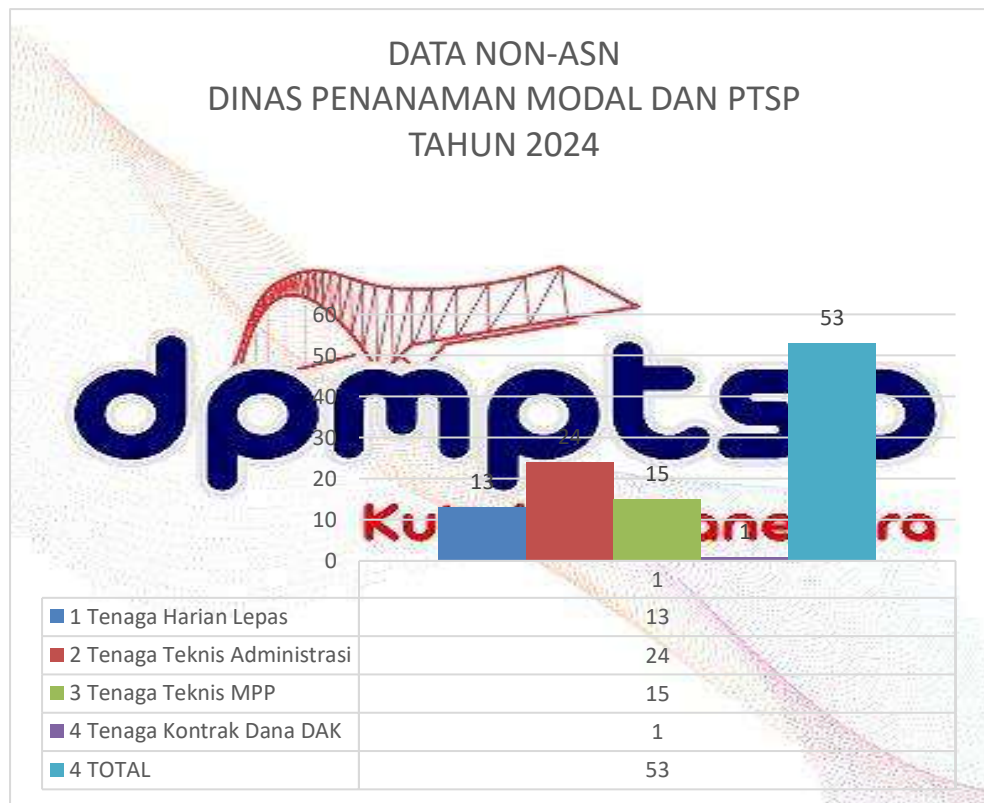
Adapun jumlah pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebanyak 66 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan sebanyak 53 Orang berstatus Non-PNS. Adapun komposisi mengenai Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP disajikan pada gambar-gambar berikut ini:

Gambar 4.
Komposisi ASN Berdasarkan Golongan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2024



Sumber : Sub Koordinator Kepegawaian, DPMPTSP 2024

Gambar 5.
Komposisi Non- ASN Berdasarkan Tugas
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2024



Sumber : Sub Koordinator Kepegawaian, DPMPTSP 2024

VII. Sarana Dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
Daftar Aset tetap
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1,279	18.446.996.324,00
	ALAT BESAR	2	18.750.000,00
	- alat pengangkat lainnya (dst)	1	1.250.000,00
	- electric generating set lainnya (dst)	1	17.500.000,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	KOMPUTER	456	8.291.977.020,00
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	47	592.735.679,00
	- Local Area Network (LAN)	11	115.830.000,00
	- Komputer Jaringan lainnya	1	8.250.000,00
	- P.C Unit	64	1.860.895.795,00
	- Lap Top	49	1.170.289.415,00
	- Note Book	11	257.570.400,00
	- Tablet PC	2	26.399.150,00
	- Hard Disk	15	251.073.785,00
	- Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	1	5.772.000,00
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	27.236.000,00
	- CPU (Peralatan Personal Komputer)	4	122.222.000,00
	- Monitor	40	1.435.820.700,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	154	729.376.376,00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	15	170.933.900,00
	- Capture Card	2	4.928.000,00
	- External/ Portable Hardisk	3	8.842.500,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	1	35.039.000,00
	- Server	4	1.268.915.440,00
	- Router	1	2.113.100,00
	- Hub	8	9.590.880,00
	- Wireless Access Point	3	33.300.000,00
	- Switch	1	36.110.000,00
	- Peralatan Jaringan lainnya	15	68.200.000,00
	- Peralatan Komputer lainnya	3	50.532.900,00
	ALAT EKSPLORASI	1	32.340.000,00
	- alat eksplorasi topografi lainnya lainnya (dst)	1	32.340.000,00
	ALAT ANGKUTAN	11	2.036.279.450,00
	- Station Wagon	5	1.221.679.450,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	450.100.000,00
	- Sepeda Motor	2	34.610.000,00
	- Kapal Visual Mini	2	95.920.000,00
	- kapal terbang lainnya (dst)	1	233.970.000,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	39	342.950.000,00
	- Battery Charge	8	18.395.000,00
	- Reciver	1	15.000.000,00
	- Global Positioning System	5	185.405.000,00
	- Scanner (Universal Tester)	25	124.150.000,00
	ALAT PERTANIAN	1	4.028.000,00
	- Lemari Penyimpan	1	4.028.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	661	6.758.884.714,00
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	9.600.000,00
	- Mesin Fotocopy Folio	2	14.660.000,00
	- Lemari Besi/Metal	6	52.073.000,00
	- Lemari Kayu	32	497.580.000,00
	- Filing Cabinet Besi	4	10.000.000,00
	- Brandkas	3	57.903.500,00
	- Kontainer	1	94.787.000,00
	- Lemari Kaca	3	13.125.000,00
	- CCTV - Camera Control Television System	20	34.750.000,00
	- White Board	1	33.243.000,00
	- Alat Penghancur Kertas	7	21.507.000,00
	- Mesin Absensi	4	68.056.000,00
	- Display	1	10.000.000,00
	- Mesin Laminating	1	120.157.500,00
	- Alat Sidik Jari	2	97.884.500,00
	- Papan Nama Instansi	1	1.500.000,00
	- Alat Kantor Lainnya	17	84.243.796,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Meja kerja kayu	14	814.698.000,00
	- Meja Rapat	1	35.959.000,00
	- Meja Resepsionis	1	121.256.250,00
	- Meja Tambahan	31	261.751.879,00
	- Meja Panjang	14	78.768.200,00
	- Kursi Tamu	8	21.200.000,00
	- Partisi	13	23.712.299,00
	- Sofa	6	72.682.000,00
	- Lemari Es	6	13.365.000,00
	- A.C. Window	3	16.500.000,00
	- A.C. Split	30	606.438.700,00
	- Kipas Angin	3	11.907.900,00
	- Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1.750.000,00
	- Rice Warmer	1	26.875.000,00
	- Tabung Gas	2	2.000.000,00
	- Mixer	1	7.700.000,00
	- Televisi	18	600.120.500,00
	- Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	10.000.000,00
	- Loudspeaker	2	8.200.000,00
	- Sound System	1	19.088.000,00
	- Wireless	1	5.430.000,00
	- Microphone	1	3.265.900,00
	- Microphone Table Stand	8	13.332.000,00
	- Camera Video	1	3.926.000,00
	- Camera film	5	86.699.900,00
	- Lambang Garuda Pancasila	2	3.000.000,00
	- Tiang Bendera	1	2.000.000,00
	- Dispenser	17	235.749.000,00
	- Handy Cam	2	25.818.000,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Alat Pemanas Ruangan	2	2.592.000,00
	- Lampu	4	13.506.900,00
	- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	7	12.210.550,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	127.451.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	137.843.200,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	172.304.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	11.845.250,00
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	36	182.457.500,00
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	17	201.369.250,00
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	19.600.000,00
	- Meja Tamu Biasa	1	1.215.014,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	39.842.333,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	24.616.333,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1	7.736.333,00
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	77	296.048.426,00
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	74	444.822.664,00
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	30.945.332,00
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	41	317.189.653,00
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	15.472.666,00
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	2	15.472.666,00
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	20	84.860.000,00
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	37	245.219.820,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	68	557.402.390,00
	- Audio Mixing Console	2	13.620.000,00
	- Audio Mixing Portable	1	10.516.000,00
	- Audio Mixing Stationer	1	1.815.000,00
	- Audio Phone In	4	4.312.000,00
	- Microphone/Wireless MIC	6	20.551.800,00
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	20	95.482.000,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Digital Audio Taperecorder	2	4.530.280,00
	- Cable	4	5.720.000,00
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	2	4.488.000,00
	- Camera Electronic	4	86.308.240,00
	- Video Monitor	2	9.300.000,00
	- Video Switcher	1	21.340.000,00
	- Tripod Camera	1	1.089.000,00
	- Lensa Kamera	1	21.500.000,00
	- Layar Film/Projector	3	34.985.000,00
	- Camera Digital	3	144.170.070,00
	- Lampu Blitz Kamera	1	1.925.000,00
	- Video Conference	1	14.300.000,00
	- LCD Monitor	2	8.450.000,00
	- Alat Studio Video Lainnya	2	19.300.000,00
	- Telephone Mobile	2	10.600.000,00
	- Facsimile	1	2.000.000,00
	- Audio Monitor	2	21.100.000,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	6.480.000,00
	- Kursi Dorong	1	3.985.000,00
	- Alat Kedokteran umum lainnya	1	2.495.000,00
	ALAT LABORATORIUM	34	386.684.750,00
	- Stabilizer	1	4.364.800,00
	- Meja Kerja	32	379.048.000,00
	- Portable Noise Monitoring	1	3.271.950,00
	ALAT PERSENJATAAN	4	11.220.000,00
	- Lemari Camera	1	6.270.000,00
	- Bateray Pack Camera	2	3.300.000,00
	- Tripot Background	1	1.650.000,00
2	EKS BPMPD	249	2.251.909.158,75

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	KOMPUTER	69	708.328.488,77
	- P.C Unit	19	226.933.610,26
	- Lap Top	16	261.173.298,77
	- Note Book	5	108.955.000,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	90.322.579,74
	- External	3	13.475.000,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	1	7.469.000,00
	ALAT ANGKUTAN	16	609.127.000,00
	- kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	192.000.000,00
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	233.200.000,00
	- Sepeda Motor	13	183.927.000,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	53.900.000,00
	- Global Positioning System	1	8.140.000,00
	- alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	45.760.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	148	781.299.469,98
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	15	44.715.000,00
	- Mesin Penghitung Uang	1	5.775.000,00
	- Lemari Besi/Metal	6	20.460.000,00
	- Filing Cabinet Besi	8	26.950.000,00
	- Lemari Makan	1	5.005.000,00
	- Mesin Absensi	2	12.045.000,00
	- Display	3	72.314.000,00
	- Meja Rapat	1	1.370.800,00
	- Meja 1/2 Biro	3	15.773.670,00
	- Kursi Tamu	11	34.865.000,00
	- Sofa	2	50.050.000,00
	- Jam Mekanis	1	10.775.000,00
	- Mesin Pemotong Rumput	1	3.000.000,00
	- Lemari Es	4	10.360.500,00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- A.C. Split	8	84.317.999,98
	- Televisi	5	112.205.000,00
	- Sound System	1	9.350.000,00
	- Wireless	1	14.630.000,00
	- Mic Conference	1	56.540.000,00
	- Tangga Aluminium	3	6.190.000,00
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	7.300.000,00
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	22	42.471.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2.310.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	6.160.000,00
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	16	16.544.000,00
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	24	109.822.500,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4	46.365.000,00
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	1	12.155.000,00
	- Camera Electronic	1	12.100.000,00
	- Slide Projector	1	12.430.000,00
	- Lensa Kamera	1	9.680.000,00
	ALAT LABORATORIUM	4	44.494.000,00
	- Generator Set (Lab Scale)	1	15.014.000,00
	- Layar	1	14.850.000,00
	- Vacuum Drying Oven	2	14.630.000,00
	ALAT PERSENJATAAN	6	8.395.200,00
	- Dispencer	6	8.395.200,00
	TOTAL	1,528	20.698.905.482,75

Sumber : Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan DPMPTSP, 2024

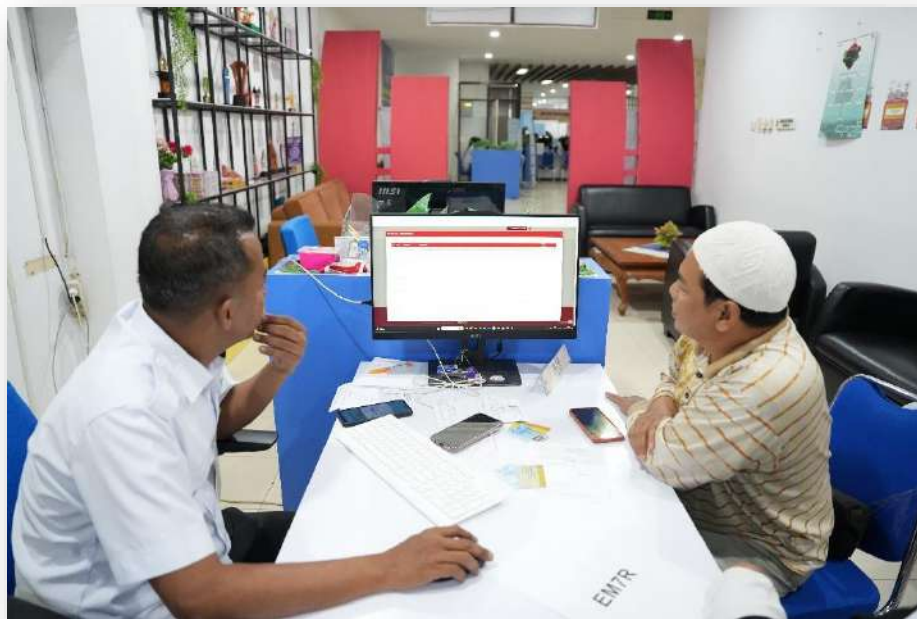
Kesemua Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung Pelayanan Perizinan baik itu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun Di Mal Pelayanan Publik/ MPP yang mana pada MPP memiliki 28 Entitas Layanan yang pada saat ini secara Kuantitatif sudah sebanding dengan beban

Pekerjaan. Namun secara Kualitas ada beberapa sarana dan prasarana yang masih butuh perbaikan dan peremajaan, seperti Perkebangan Teknologi dan tuntutan pelayanan prima, Adapun sarana dan prasarana yang meunjang pelayanan tersebut yaitu :

1. Loker Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di ruangan Mall Pelayanan Publik (MPP), yang didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel, lantai yang selalu terlihat bersih, hawa ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi.

Gambar 6.
Loker Layanan Terpadu Satu Pintu



2. Layanan Costumer Servis

Di loket Costumer servis, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan serta berbagai pelayanan lain yang tersedia di Mall Pelayanan Publik dengan penuh keramahan, berpakaian seragam yang berbeda

dengan pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya, menghilangkan kesan birokrasi dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 7.
Layanan Costumer Servis



3. Prasarana Layanan Pendukung

Di Mall Pelayanan Publik tersedia beberapa prasarana layanan pendukung perizinan yang diharapkan mampu membantu para masyarakat (pemohon) dalam mengurus perizinan dan nonperizinan.

Gambar 8.
Layanan POLRES DAN Layanan SAMSAT



Gambar 9.
Layanan Dinas Transmigrasi & Ketenagakerjaan, dan Layanan Imigrasi



Gambar 10.
Layanan Pajak, Layanan Pegadaian dan Layanan Kantor Pertanahan



Gambar 11.
Layanan BPJS Ketenagakerjaan, PDAM Tirta Mahakam
dan Pengadilan Agama



Gambar 12.
Layanan Pengadilan Negeri, Layanan Kantor Pos dan Kejaksaan Negeri





Gambar 13.
Layanan DISDUKCAPIL





4. Prasarana pendukung lainnya seperti Bankaltimtara, Bank Rakyat Indonesia. Dalam dalam satu gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*one stop service*) yang memudahkan pemohon dalam pengurusan perizinan dari pengajuan permohonan, pembayaran retribusi izin sampai kegiatan investasi perbankan lain sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Gambar 13.
Layanan Perbankan (Bankaltimtera dan BRI)



5. Perpustakaan/ Pojok Baca

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Kartanegara menyediakan perpustakaan mini, yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, pemohon izin dan tamu untuk membaca berbagai macam buku yang tersedia dalam bentuk fisik maupun digital.

Gambar 14.
Pojok Baca Digital





6. Ruang Bermain Anak

Ruang bermain anak disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya untuk mengurus izin agar anak tidak merasa bosan.

Gambar 15.
Ruang Bermain Anak



7. Ruang Laktasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya.

Gambar 16.
Ruang Laktasi



8. Layanan Pengaduan

Layanan Pengaduan merupakan salah satu sarana atau fasilitas pengaduan yang dapat digunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

Gambar 17.
Layanan Pengaduan



9. Aksesibilitas

Aksesibilitas disediakan untuk memudahkan penyandang disabilitas, ibu hamil dan lansia yang menggunakan kursi roda dan tongkat.

Gambar 18.
Layanan Aksesibilitas



10. Alat Cetak Mandiri

Alat cetak mandiri dapat digunakan untuk membantu pemohon dalam memproses.

Gambar 19.
Alat cetak Mandiri



11. Monitor Locket Antrian

Ruang Tunggu Antrian terdapat di beberapa titik di lantai satu Mall Pelayanan Publik. Ruang Tunggu Antrian digunakan untuk memfasilitasi pemohon agar dapat duduk dengan nyaman ketika menunggu nomor antriannya dipanggil.

Gambar 20.
Ruang Tunggu





12. Layanan Pernikahan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menyediakan fasilitas ruang akad nikah. Ruang akad nikah dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang menginginkan akad nikah diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik.

Gambar 21.
Ruang pernikahan





VIII. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas kondisi umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan sasara, IKU, RKT, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan dokumen ikhtisar perjanjian kinerja

tahun 2024 serta Rencana Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan Realisasi, Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024 serta Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya (2021 dan 2022).

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan langkah dimasa akan datang yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

I. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah, yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021–2026 dan diturunkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Perumusan atas Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

II. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

“(Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia)”

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;

2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;

3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;

5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

III. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Misi ke- 1 (Satu) yaitu **“Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”** dan misi ke tiga **“Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”**, dengan program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA) dan Program Kukar Bebaya. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan

sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”					
NO.	Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman moda	Indek Kepuasan Masyarakat (%)
2	Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Investasi daerah melalui efisiensi pelayanan investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)	Nilai Realisasi Investasi (PMA/ PMDN) Triliun Rupiah

Sumber : RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara



Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.
Tujuan/ Sasaran Strategis DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Triliun Rupiah	3,88	3,95	4,02	4,09	4,16
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,12	87,75	88,25	89,52	91,73

Sumber data : Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

IV. Indikator Kinerja Utama

Setiap Sasaran Strategis Perangkat Daerah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu: Tingkat Pertumbuhan Investasi. Dan dari hasil pemantauan dan evaluasi capaian IKK LPPD Tahun 2022 maka Sesuai dengan surat nomor : B-1927/TAPEM/ OTDA/ 100/ 08/ 2023 tanggal 07 Agustus 2023 terjadi perubahan atas target kinerja Tujuan, hal ini dikarenakan Target Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN meningkat pesat dikarenakan target Investasi yang

kami masukan didalam RPJMD adalah target kami dimasa *Pandemi covid 19* dimana situasi ekonomi yang melambat dan tidak adanya kepastian dari keadaan tersebut, Dan ketika *Pandemi Covid 19* berakhir kami menentukan target baru seiring meningkatnya minat investasi di kutai kartanegara yang mula-mula target kami 1,73 persen menjadi 30,47 persen dimana target tersebut kami ambil dari persentase pertumbuhan investasi PMA dan PMDN dari tahun 2019 s.d tahun 2022 hal ini dapat kami simpulkan setelah kami melakukan kajian terhadap data kinerja DPMPTSP tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut diatas, Berikut disajikan IKU Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021-2026:

Tabel 5.
IKU (Indikator Kinerja Utama) DPMPTSP
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan Awal					Target tahunan Baru				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Triliun Rupiah	3,88	3,88	3,95	4,02	4,09	7 T	7,2 T	7,35 T	7,4 T	7,45 T
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,12	87,12	87,75	88,25	89,52	87,12	87,12	87,75	88,25	89,52

Sumber : IKU Perubahan DPMPTSP 2021-2026

V. Rencana Kerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran/ operasionalisasi dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dan akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Adapun Program Kegiatan dan sub kegiatan yang telah sesuai dengan nomenklatur baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Rencana Kerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KETERANGAN
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4			5
	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)	7.35	Triliyun Rupiah	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,25	Nilai	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85	Nilai	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	13	Dokumen	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4	Dokumen	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KETERANGAN
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4			5
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	100	Persen	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	org/ Bulan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dokumen	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KETERANGAN
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4			5
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3	Laporan	
		Penyusun Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	Laporan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	100	Persen	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beseta Atribut Kelengkapannya	300	Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KETERANGAN
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4			5
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15	Orang	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75	Orang	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	Paket	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1	Paket	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	2	Paket	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KETERANGAN
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4			5
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	Laporan	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	500	Dokumen	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	500	Dokumen	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70	Unit	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70	Unit	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	100	Persen	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KETERANGAN
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4			5
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Laporan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108	Unit	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	144	Unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung laiinya yang dipelihara /direhabilitasi	2	Unit	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Jumlah Proyek (PMA/ PMD)	652	Proyek	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KETERANGAN
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4			5
		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	
		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	30	Dokumen	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ kota	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi			
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	1	Dokumen	
		Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	1	Dokumen	
3	Program Promosi Penanaman Modal		Jumlah Investor (PMA/ PMDN)	310	Investor	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	310	Investor	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KETERANGAN
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4			5
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman ModalKewenangan Kabupaten / Kota	1	Dokumen	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	4	Dokumen	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal		Jumlah Penerbitan Izin	950	Jumlah Izin	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizin secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM	88,25	Nilai	
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	500	Pelaku Usaha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KETERANGAN
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4			5
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	300	Kegiatan Usaha	
		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100	Orang	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Kordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	12	Kegiatan Usaha	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Penaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN	30.68	Persen	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KETERANGAN
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4			5
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	1020	Pelaku Usaha/ Kegiatan Usaha	
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan	150	Kegiatan Usaha	
		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	150	Pelaku Usaha	
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan	150	Kegiatan Usaha	
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Jumlah Aplikasi	3	Aplikasi	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			KETERANGAN
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan	
1	2	3	4			5
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi	3	Aplikasi	
		Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintgrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3	Dokumen	

VI. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Reformulasi desain investasi menuju hilirsasi SDA terutama *Blue Investment* dan *Green Investment*;
2. Digitalisasi dan Penggunaan AI (*artificial intelegent*) pelayanan perizinan.

VII. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Reformulasi desain investasi menuju hilirsasi SDA	- Pemberian insentif pada investasi yang mentransformasikan sektor hulu menuju sektor hilir; - Pengendalian investasi penanaman modal menuju hilirisasi SDA.
2	Digitalisasi dan Penggunaan AI (<i>artificial intelegent</i>) pelayanan perizinan	Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.

VIII. Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 8.
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1	Meningkatnya daya saing daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
				Jumlah Investor (PMDN/ PMA)	Program Promosi Penanaman Modal
				Kenaikan/Penurunan PMA/PMDN	Program Pengendalian Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal
				Jumlah Aplikasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

IX. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 9.
Perjanjian Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keluaran/ Hasil	Keterangan / Rumus Penghitungan
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Pertumbuhan Investasi	Persentase	30,6	10,85	Hasil Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) pada Aplikasi NSWI
2	Meningkatnya Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,25	92,91	Hasil Survey IKM dikalikan dengan 100 (Seratus)

Selain perjanjian kinerja yang berdasarkan dari dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat perjanjian kinerja tambahan yang merupakan amanat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel 10.
Perjanjian Kinerja Tambahan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keluaran/ Hasil
1	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret Setiap tahun	Persen	100	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keluaran/ Hasil
2	Mewujudkan tingkat kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% Paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100
3	Terlaksananya Kapatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100
4	Terlaksananya Kapatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per Tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100
5	Terlaksananya Kapatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian usulan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keluaran/ Hasil
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	100
7	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100	100
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100
10	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (Gema)	Laporan Pemetaan Kemampuan mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keluaran/ Hasil
11	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1	1
12	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100	100
13	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100
14	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100	100
15	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100
16	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keluaran/ Hasil
17	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100
18	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70	83,14
19	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100	100
20	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	100
21	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100	100
22	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	100
23	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	100
24	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan	Persen	100	100
25	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	75
26	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keluaran/ Hasil
27	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1	1
28	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	100
29	Peningkatan Investasi	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Rupiah	7,35 T	7,4 T
30	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100	100
31	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	40
32	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3,1135
33	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	74,13
34	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	64
35	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	49,57
36	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95	8,95

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keluaran/ Hasil
37	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau
38	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100
39	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	100
40	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	100
41	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100

Tabel 11.
Perbandingan Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2024
Dengan Data Awal Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	DATA AWAL (2022)	TARGET (2023)	TARGET AKHIR RENSTRA
					(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Triliun Rupiah	7 T	7,2 T	7,45 T
2	Indeks Kepuasan Masrakat	Nilai	87,12	87,12	89,52

Sedangkan untuk perjanjian kinerja tambahan tidak bisa dibandingkan dikarenakan banyaknya tambahan Indikator Kinerja Sasaran pada perjanjian kinerja tahun 2024 yang tidak ada pada perjanjian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023).

X. Rencana Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, maka operasionalisasi atau pelaksanaan kinerja tahunan di tuangkan dalam Rencana kerja Tahun 2024 dan Dokumen pelaksanaan Anggaran. Pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Kepmendagri 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka RENJA tahun 2024 sudah mengacu pada KEPMEN tersebut. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan anggaran murni sebesar Rp. 20.261.146.351,- melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2024 menjadi Rp. 23.352.398.850,80.

Tabel 12.
Program Kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran (APBD) Tahun 2024

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Lokasi	Target	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal				20.261.146.351,00	23.352.398.850,80
	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)	Kab. Kutai Kartanegara	7.35		
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kab. Kutai Kartanegara	88,25		
01:01	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kab. Kutai Kartanegara	85	15.350.723.351,00	16.482.962.850,80
01:01:01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	13	585.000.000,00	786.959.126,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	3	266.625.000,00	275.961.000,00

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Lokasi	Target	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	4	85.000.000,00	85.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	6	233.375.000,00	425.998.126,00
01:01:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Kab. Kutai Kartanegara	100	10.735.164.656,00	10.718.011.530,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	70	10.312.681.530,00	10.312.681.530,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Kutai Kartanegara	1	65.000.000,00	65.000.000,00

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Lokasi	Target	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	5	77.483.126,00	24.330.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	3	250.000.000,00	286.000.000,00
	Penyusun Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	1	30.000.000,00	30.000.000,00
01:01:03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	3	110.000.000,00	100.664.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1	40.000.000,00	30.664.000,00

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Lokasi	Target	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2	70.000.000,00	70.000.000,00
01:01:04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	100	552.000.000,00	802.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	300	127.000.000,00	127.000.000,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	4	100.000.000,00	100.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	15	75.000.000,00	75.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	75	250.000.000,00	500.000.000,00

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Lokasi	Target	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
01:01:05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100	1.254.951.019,00	1.150.238.545,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1	170.000.000,00	170.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1	250.000.000,00	250.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2	100.000.000,00	88.303.400,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12	30.000.000,00	30.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Kutai Kartanegara	12	561.935.145,00	561.935.145,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	500	50.000.000,00	50.000.000,00

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Lokasi	Target	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	500	93.015.874,00	0
01:01:06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	70	361.000.000,00	387.226.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	70	361.000.000,00	387.226.000,00
01:01:07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Kab. Kutai Kartanegara	100	1.364.757.676,00	1.851.013.649,80
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	3	5.599.000,00	5.599.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12	120.000.000,00	128.144.389,80

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Lokasi	Target	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	24	149.480.000,00	149.480.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12	1.089.678.676,00	1.567.790.260,00
01:01:08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	108	387.850.000,00	686.850.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara	144	263.620.000,00	362.620.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	60	59.230.000,00	59.230.000,00

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Lokasi	Target	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung laiinya yang dipelihara /direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	2	65.000.000,00	265.000.000,00
01:02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyek (PMA/ PMD)	Kab. Kutai Kartanegara	652	1.050.000.000,00	1.150.000.000,00
01:02:09	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000,00	200.000.000,00
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	Kab. Kutai Kartanegara	30	200.000.000,00	200.000.000,00
01:02:10	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ kota	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi	Kab. Kutai Kartanegara	1	850.000.000,00	950.000.000,00
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000,00	300.000.000,00

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Lokasi	Target	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
	Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1	650.000.000,00	650.000.000,00
01:03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/ PMDN)	Kab. Kutai Kartanegara	310	1.200.000.000,00	1.081.660.000,00
01:03:11	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	Kab. Kutai Kartanegara	310	1.200.000.000,00	1.081.660.000,00
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman ModalKewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1	200.000.000,00	81.660.000,00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	4	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
01:04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan Izin	Kab. Kutai Kartanegara	950	850.000.000,00	865.000.000,00

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Lokasi	Target	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
01.04.12	Pelayanan Perizinan dan Non Perizin secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM	Kab. Kutai Kartanegara	88,25	850.000.000,00	865.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	12	200.000.000,00	40.000.000,00
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	350	200.000.000,00	275.000.000,00

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Lokasi	Target	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	100	200.000.000,00	- 300.000.000,00
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Kutai Kartanegara	300	250.000.000,00	250.000.000,00
01:05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Kab. Kutai Kartanegara	30.68	1.310.423.000,00	1.229.923.000,00
01:04:13	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	Kab. Kutai Kartanegara	1020	1.310.423.000,00	1.229.923.000,00

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Lokasi	Target	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan	Kab. Kutai Kartanegara	150	291.563.000,00	251.437.000,00
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Kutai Kartanegara	150	535.734.000,00	535.734.000,00
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan	Kab. Kutai Kartanegara	150	483.126.000,00	442.752.000,00
01:06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi	Kab. Kutai Kartanegara	3	500.000.000,00	2.542.853.000,00

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Lokasi	Target	Anggaran	
					Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
01:06:14	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi	Kab. Kutai Kartanegara	3	500.000.000,00	2.542.853.000,00
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Kutai Kartanegara	3	500.000.000,00	2.542.853.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

I. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/ IX/ 6/ B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 13.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

II. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun sebelumnya

Hasil evaluasi implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang merupakan periode akhir, dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 14.
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2022 dan 2023

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai 2022	Bobot	Nilai 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	29,10	30	22,93
2.	Pengukuran Kinerja	30	29,10	30	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,20	15	10,20
4.	Evaluasi Kinerja	25	23,50	25	17,00
	Total	100	94,90		74,13
	Kategori		AA		BB
	Interpretasi		Sangat Memuaskan		Sangat Baik

Sumber : LHE SAKIP DPMPTSP, 2023

Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas pada tahun sebelumnya dilakukan penilaian sebanyak 4 (empat) komponen, adapun penilaian tahun sebelumnya mengindikasikan adanya upaya perbaikan dan/ atau tindakan korektif secara signifikan, baik tindakan korektif yang didasarkan pada rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal/ mandiri sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun sebelumnya pada prinsipnya perangkat daerah telah melakukan upaya perbaikan. Namun capaian hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya terjadi penurunan nilai, hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian penilaian dalam mengimplementasikan sesuai pedoman Permenpan 88 Tahun 2021. Hal signifikan yang mempengaruhi diantaranya adalah pemenuhan kriteria nilai penilaian sebagai berikut:

1. AA (bobot nilai 100), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
2. A (bobot nilai 90), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
3. BB (bobot nilai 80), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.

Berdasarkan hasil tersebut inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan rekomendasi/ tindak lanjut atas laporan evaluasi implementasi Sistem AKIP di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Melakukan reviu seluruh dokumen perencanaan PD. Hasil reviu agar digunakan untuk perbaikan kualitas perencanaan dengan memastikan dokumen perencanaan telah mengawal kinerja sesuai dengan tingkat jabatan yang seharusnya diampu dan telah berorientasi outcome.
2. Menyusun pohon kinerja/flogical framework sesuai kaidah yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Pohon kinerja diharapkan dapat menjabarkan kinerja yang memenuhi unsur logis (sebabakibat) serta menyajikan alternatif kinerja yang beragam dan efektif dalam mendorong tercapainya kinerja utama. Pohon kinerja yang disusun agar dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan cascading kinerja dan dokumen perencanaan.
3. Melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome sebagai upaya untuk mencapai suatu kinerja.
4. Melakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang ada dengan menyesuaikan kondisi aktual.
5. Memperbaiki kualitas dokumen laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/ internasional (*benchmark* kinerja).
6. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan capaian kinerja.

Dan Rencana Tindak Lanjut dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Sebagai Berikut:

1. Melakukan reviu terkait dokumen perencanaan DPMPTSP dan tertuang didalam studi awal.

2. Telah dilakukan perbaikan Pohon Kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89/ 2021 (Terlampir).
3. DPMPTSP telah melakukan identifikasi Crosscutting kinerja yang telah tergambar pada pohon kinerja dan crosscutting.
4. Telah dilakukan reviu terhadap SOP terkait program pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang sesuai dengan kondisi aktual, dengan Nomor : B-2.1/ DPMPTSP/ SET.3/ 900/ 01/ 2025 Tgl 02 Januari 2025.
5. Untuk Memperbaiki kualitas dokumen laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/intemasional (benchmark kinerja), kami telah melakukan benchmak kinerja ke DPMPTSP Kota Bandung pada 10,79 T pada tahun 2024 dengan perbandingan realisasi investasi dengan target pada Kota Bandung mencapai 147,82 % sedangkan pada Kutai Kartanegara mencapai 16,42 T pada Tahun 2024 dengan perbandingan realisasi investasi dan target sebesar 223%.

III. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 sebesar 155,24%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 16.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Triliun Rupiah	1,68	2,01	119,64%	7	9,78	139,71%	7,2	14,809	205,68%	7,35	16,415	223,33%	Meningkat
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87	87,09	100,10%	87,12	91,35	104,86%	87,75	91,96	104,80%	88,25	92,91	105,28%	Meningkat
Rata-rata				109,87%			122,28%			155,24%			164,31%			Meningkat

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP



Rata-rata realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 sebesar 1833,78% akan tetapi pada perhitungan tabel diatas rata - rata realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 sebesar 122,28% hal ini dikarenakan pada tabel untuk Indikator Kinerja "Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)" *tidak dimasukan* dalam Indikator Kinerja tahun ini dikarenakan bukan merupakan Indikator Kinerja.

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-1" tahun 2024 capaian kinerja Nilai realisasi investasi sebesar 16,415 Triliun Rupiah dengan pertumbuhan investasi sebesar 10,85% atau capaian kinerja sebesar 223,33% (*Sumber Data: LKPM, Aplikasi NSWI, Koordinator Penanaman Modal*). Pencapaian Tingkat Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun mengalami *fluktuatif* hal ini disebabkan karena :

- *Fluktuatif* Harga Komoditas dimana Kabupaten Kutai Kartanegara masih Ketergantungan pada sektor pertambangan dan energi menyebabkan volatilitas investasi ketika harga batu bara dan minyak turun.
 - Krisis Ekonomi Global dimana ekonomi dunia mengalami perlambatan yang mempengaruhi arus modal masuk ke Indonesia termasuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Regulasi Lingkungan yang Ketat menyebabkan beberapa industri besar yang bergerak pada sektor tambang dan industri mengalami kendala terkait perizinan lingkungan.
 - Ketimpangan Infrastruktur di Wilayah Tertentu dimana beberapa kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur penting. Serta telah berjalannya proyek-proyek investasi pada tahun-tahun sebelumnya
- Persaingan dengan Daerah Lain yang telah mempunyai kawasan industri atau sentra- sentra industri yang lebih berkembang daripada Kabupaten Kutai Kartanegara.

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2024 sebesar 88,25 dan realisasinya 92,91 atau capaian kinerja sebesar 105,28% (*sumber data: Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu*). Target kinerja melebihi target dengan kriteria penilaian Sangat tinggi, Terdapat peningkatan sebesar 0,95 dibandingkan dengan IKM tahun 2023. Pengukuran kepuasan Masyarakat (SKM) berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan paramater untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh organisasi selaku penyedia jasa layanan. Berdasarkan pengukuran tingkat kepuasan pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pada tahun 2024 ini, IKM Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada Kategori A (Sangat Baik). Hasil pengukuran kepuasan masyarakat pada 3 tahun terakhir sejak tahun 2022 menunjukkan tren yang baik (meningkat). Pada tahun 2022 nilai SKM sebesar 91,35, tahun 2023 sebesar 91,96 dan tahun 2024 sebesar 92,91.

Pengukuran ini dilakukan pada layanan publik yang disediakan/ diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuran dilakukan pada 9 unsur yang oleh Kementerian PAN dan RB telah ditetapkan sebagai parameter dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Setiap unsur diukur dengan 1 (satu) pertanyaan dengan pilihan jawaban tentang preferensi responden berdasarkan pengalaman mengakses layanan publik. Melalui cara ini maka dapat diperoleh gambaran penilaian masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara atas layanan publik yang pernah mereka terima.

IV. Perbandingan Realisasi Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten/ Kota Lainnya

Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Timur menetapkan target realisasi investasi sebesar Rp 76,02 triliun. Hingga Triwulan IV tahun 2024, capaian realisasi investasi telah mencapai Rp 76,335 triliun, terdiri dari Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 55.078,9 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 1.417,1 US\$.Juta.

Kabupaten Kutai Kartanegara berperan signifikan dalam pencapaian ini. Pada tahun 2024, realisasi PMDN di kabupaten ini mencapai Rp 8,35 triliun, menempatkannya sebagai kontributor terbesar kedua setelah Kota Balikpapan yang mencapai Rp 21,30 triliun. Selain itu, realisasi PMA di Kutai Kartanegara mencapai Rp 8,07 triliun, menjadikannya kontributor utama dalam kategori ini. Adapun Realisasi Investasi Tahun 2024 dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya yaitu :

Tabel 17.
Perbandingan Realisasi Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara
dengan Realisasi Investasi Kabupaten/ Kota Lainnya

Kabupaten/Kota	Jumlah PMDN	Jumlah PMA (Dalam Rp)	Jumlah PMDN + PMA)
Berau	2.632.703.352.454	956.777.089.362	3.589.480.441.816
Kutai Barat	6.857.564.151.305	828.554.923.693	7.686.119.074.998
Kutai Kartanegara	8.346.870.226.939	8.069.017.988.494	16.415.888.215.433
Kutai Timur	5.169.652.677.436	4.283.091.585.438	9.452.744.262.874
Maham Ulu	282.071.263.084	502.153.002.769	784.224.265.853
Paser	1.995.529.723.281	1.126.229.425.447	3.121.759.148.728
Penajam Paser Utara	2.893.563.511.589	811.634.357.488	3.705.197.869.077
Kota Balikpapan	21.301.959.479.512	4.403.610.377.993	25.705.569.857.505
Kota Bontang	2.549.914.790.019	139.275.000.000	2.689.189.790.019
Kota Samarinda	3.049.090.107.114	135.773.048.813	3.184.863.155.927

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

Dengan tren positif ini, diharapkan tahun-tahun kedepan Kabupaten Kutai Kartanegara bersama kabupaten/ kota lain di Kalimantan Timur dapat mencapai atau bahkan melampaui target investasi yang telah ditetapkan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Dengan mencari sumber investasi baru sebagai pengganti sektor pertambangan yang sekarang ini menjadi penyumbang investasi terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

V. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya.

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar **164,31%**. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar **155,24%**. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 9,07%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 18.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan
Realisasi Kinerja Sebelumnya (Tahun 2023)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Triliun Rupiah	7,2	14,809	205,68%	7,35	16,415	223,33%	Meningkat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87,75	91,96	104,80%	88,25	92,91	105,28%	Meningkat
Rata-rata						155,24%			164,31%	Meningkat 9,07%

VI. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 19.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No.	Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024
1	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	7,35	16,415	223,33%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,25	92,91	105,28%

Analisis atas pencapaian Sasaran Strategis yang di ukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2024 capaian kinerja Nilai realisasi investasi sebesar 16,415 Triliun Rupiah dengan pertumbuhan investasi sebesar 10,85% atau capaian kinerja sebesar 223,33% (*Sumber Data: LKPM, Aplikasi NSWI, Koordinator Penanaman Modal*).

Pencapaian sasaran strategis ini tergambar dengan di raihnya Penghargaan “Terbaik II Daya Saing Investasi tahun 2024”. Pada penghargaan Arindama di HUT ke-68 Propvinsi Kalimantan Timur.

Gambar 21.
Penerimaan Penghargaan 2024



2. Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2024 sebesar 88,25 dan realisasinya 92,91 atau capaian kinerja sebesar 105,28% (*sumber data: Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu*). Target kinerja melebihi target dengan kriteria penilaian Sangat tinggi, Terdapat peningkatan sebesar 0,95 dibandingkan dengan IKM tahun 2023.

Hal ini ditunjukkan dengan rekapitulasi dari pengunjung/ masyarakat yang memberikan penilaian pada pengukuran survey pada saat kunjungan pada MPP Kutai Kartanegara tahun 2024.

Gambar 22
Jumlah Kunjungan 2024 dan Survey Masyarakat



Pencapaian sasaran strategis ini tergambar dengan di raihnya Penghargaan “Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) tahun 2024”.

Gambar 23
Penerimaan Penghargaan 2024



VII. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program (%)	Efisiensi (%)	Ket.
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	223,33%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99,83	0,17	
				Program Promosi Penanaman Modal	99,66	0,34	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	105,28%	Program Pelayanan Penanaman Modal	93,89	6,11	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	72,01	27,99	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program (%)	Efisiensi (%)	Ket.
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	31,49	68,51	

VIII. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelayanan Penanaman modal

Indikator kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu Jumlah Proyek tahun 2024 dengan target kinerja program sebesar 652 Proyek dan realisasinya sebesar 3085 Proyek atau capaian kinerja sebesar 473,16%.

Tabel 21.

Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelayanan Penanaman Modal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	652	3085	473,16
			Program Promosi Penanaman Modal	310	281	90,65
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	30,68	10,85	35,37

Sumber Data : LKPM, Aplikasi NSWI, Koord. Penanaman Modal DPMPSTSP

Gambar 23.
Pendampingan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal





Sumber Data : Koord. Penanaman Modal DPMPTSP 2024

2) Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dengan target kinerja program sebesar 88,25 dan realisasinya sebesar 92,91 atau capaian kinerja sebesar 105,28%. Target kinerja tercapai dan melebihi target hal ini dikarenakan berdasarkan hasil analisis kinerja masing- masing indikator survei kepuasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuran ini dilakukan pada layanan publik yang disediakan/ diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuran dilakukan pada 9 unsur yang oleh Kementerian PAN dan RB telah ditetapkan sebagai parameter dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Setiap unsur diukur dengan 1 (satu) pertanyaan dengan pilihan jawaban tentang preferensi responden berdasarkan pengalaman mengakses layanan publik. Melalui cara ini maka dapat diperoleh gambaran

penilaian masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara atas layanan publik yang pernah mereka terima.

Tabel 22.
Indikator Program Pelayanan Penanaman Modal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	% Realisasi Capaian Kinerja Program
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	88,25	92,91	105,28

Sumber Data: Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 2024, Koord. PTSP DPMPTSP

Berikut data hasil capaian kinerja program penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2024

Tabel 23.
Capaian Kinerja Program (Keberhasilan/ Kegagalan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	652	3085	473,16	Berhasil
			Program Promosi Penanaman Modal	310	281	90,65	Berhasil
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	30,68	10,85	35,37	Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	10.000	12757	127,57	Berhasil
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	3	3	100,00	Berhasil

IX. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/ kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 83,14%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	PERSENTASE PERTUMBUHAN INVESTASI DAERAH	30,6	%	23.352.398.850,00	19.414.613.701,00	10,85	83,14	35,46
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	74	Nilai	16.453.909.214,00	14.662.779.021,00	74,13	89,11	100,18
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja</i>	<i>16</i>	<i>Dokumen</i>	<i>786.959.126,00</i>	<i>762.735.913,00</i>	<i>16</i>	<i>96,92</i>	<i>100,00</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	4	Dokumen	275.961.000,00	268.693.832,00	4	97,37	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	85.000.000,00	75.601.900,00	4	88,94	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9	Laporan	425.998.126,00	418.440.181,00	9	98,23	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Administrasi Keuangan	100	%	10.718.011.530,00	9.324.570.313,00	83,13	87,00	83,13
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	66	Orang/Bulan	10.312.681.530,00	8.923.235.209,00	66	86,53	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1	Laporan	65.000.000,00	64.677.799,00	1	99,50	100,00
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dokumen	24.330.000,00	24.306.900,00	5	99,91	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	24	Laporan	286.000.000,00	283.600.000,00	24	99,16	100,00
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	30.000.000,00	28.750.405,00	1	95,83	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Administrasi BMD	100	%	100.664.000,00	91.496.725,00	100	90,89	100,00
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	1	Dokumen	30.664.000,00	22.846.972,00	1	74,51	100,00
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4	laporan	70.000.000,00	68.649.753,00	4	98,07	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Admintrasi Kepegawaian	100	%	802.000.000,00	786.777.803,00	100	98,10	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	Paket	127.000.000,00	116.852.000,00	2	92,01	100,00
12	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	Dokumen	100.000.000,00	95.761.802,00	100	95,76	100,00
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15	Orang	75.000.000,00	74.164.001,00	15	98,89	100,00
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150	Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	150	100,00	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Administrasi Umum	100	%	1.150.238.545,00	1.130.291.765,00	100	98,27	100,00
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	170.000.000,00	166.407.400,00	1	97,89	100,00
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	250.000.000,00	249.076.000,00	1	99,63	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket barang cetak dan pengandaan yang disediakan	2	Paket	88.303.400,00	88.303.400,00	2	100,00	100,00
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	Paket	30.000.000,00	19.890.000,00	12	66,30	100,00
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	561.935.145,00	556.614.965,00	12	99,05	100,00
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	500	100,00	100,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Pengadaan BMD	100	%	387.226.000,00	340.806.000,00	100	88,01	100,00
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	70	Unit	387.226.000,00	340.806.000,00	70	88,01	100,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Penyediaan Jasa	100	%	1.851.013.649,00	1.773.270.751,00	100	95,80	100,00
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	5.599.000,00	5.492.000,00	3	98,09	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	128.144.389,00	116.225.810,00	12	90,70	100,00
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	1.567.790.260,00	1.502.956.941,00	24	95,86	100,00
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	149.480.000,00	148.596.000,00	12	99,41	100,00
8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Cakupan Pemeliharaan BMD</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>657.796.364,00</i>	<i>452.829.751,00</i>	<i>100</i>	<i>68,84</i>	<i>100,00</i>
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	48	Unit	316.930.000,00	316.930.000,00	48	100,00	100,00
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60	Unit	75.866.364,00	74.747.800,00	60	98,53	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2	Unit	265.000.000,00	61.151.951,00	1	23,08	50,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	652	Proyek	1.150.000.000,00	1.148.040.385,00	3085	99,83	473,16
9	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perda	200.000.000,00	199.223.310,00	1	99,61	100,00
29	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	30	Dokumen	200.000.000,00	199.223.310,00	30	99,61	100,00
10	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi	3	Dokumen	950.000.000,00	948.817.075,00	3	99,88	100,00
30	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	300.000.000,00	299.279.786,00	1	99,76	100,00
31	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1	Dokumen	650.000.000,00	649.537.289,00	1	99,93	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	310	Investor	1.081.660.000,00	1.077.936.018,00	281	99,66	90,65
11	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Jumlah Investor (PMA/PMDN)</i>	<i>310</i>	<i>Investor</i>	<i>1.081.660.000,00</i>	<i>1.077.936.018,00</i>	<i>281</i>	<i>99,66</i>	<i>90,65</i>
32	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	2	Dokumen	81.660.000,00	80.659.600,00	2	98,77	100,00
33	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1.000.000.000,00	997.276.418,00	4	99,73	80,00
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerbitan Izin	10.000	Izin	894.053.636,00	839.436.788,00	12757	93,89	127,57
12	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Indek Kepuasan Masyarakat</i>	<i>87,75</i>	<i>Nilai</i>	<i>894.053.636,00</i>	<i>839.436.788,00</i>	<i>93,06</i>	<i>93,89</i>	<i>106,05</i>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12	Kegiatan Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	12	100,00	100,00
35	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	500	Pelaku Usaha	275.000.000,00	273.587.450,00	500	99,49	100,00
36	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	100	Pelaku Usaha	300.000.000,00	246.795.702,00	100	82,27	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	300	Pelaku Usaha	279.053.636,00	279.053.636,00	300	100,00	100,00
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Invetasi	30,68	%	1.229.923.000,00	885.676.489,00	10,85	72,01	35,37
13	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Jumlah Pengendalian PMA/PMDN</i>	<i>1020</i>	<i>Pelaku Usaha</i>	<i>1.229.923.000,00</i>	<i>885.676.489,00</i>	<i>927</i>	<i>72,01</i>	<i>90,88</i>
38	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	150	Kegiatan Usaha	251.437.000,00	144.871.674,00	3	57,62	2,00
39	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	150	Pelaku Usaha	535.734.000,00	445.753.895,00	898	83,20	598,67

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150	Kegiatan Usaha	442.752.000,00	295.050.920,00	26	66,64	17,33
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3	Aplikasi	2.542.853.000,00	800.745.000,00	3	31,49	100,00
14	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Pengembangan dan Maintance Aplikasi</i>	3	Aplikasi	2.542.853.000,00	800.745.000,00	3	31,49	100,00
41	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	3	Dokumen	2.542.853.000,00	800.745.000,00	3	31,49	100,00

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi anggaran sebesar **93.48%**, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 25.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2023)

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	86 Nilai	15.476.798.274	14.602.792.387	94,35	94,90	110,35
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	17 Dokumen	732.274.612	719.653.846	98,28	17	100,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	4 Dokumen	198.995.000	198.593.000,00	99,80	4	100,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24.000.000	24.000.000,00	100	1	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	21.000.000	17.100.000,00	81,43	1	100,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000,00	100	1	100,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	17.100.000,00	85,5	1	100,00
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 Laporan	448.279.612	442.860.846,00	98,79	9	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100 Persentase	8.803.041.195	8.225.920.588	93,44	100	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	84 Orang/ Bulan	8.443.928.807	7.876.895.200,00	93,28	84	100,00
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	94.377.788	91.551.188,00	97,01	1	100,00
1.2.3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lnjut Pemeriksaan	1 Dokumen	18.959.800	18.959.800,00	100	1	100,00
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulan/ semester SKPD	24 Laporan	233.759.800	226.499.400,00	96,89	24	100,00
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.015.000	12.015.000,00	100	1	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD	5 Dokumen	136.488.500	100.961.520	73,97	5	100,00
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	14.999.000	14.998.520,00	100,00	1	100,00
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	121.489.500	85.963.000,00	70,76	4	100,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Admintrasi Kepegawaian	100 Persentase	736.340.000	724.164.080	98,35	100	100,00
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	220.780.000	215.413.500,00	97,57	2	100,00
1.4.2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 Dokumen	28.060.000	26.305.680,00	93,75	100	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	75.000.000	71.828.900,00	95,77	15	100,00
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	102 Orang	412.500.000	410.616.000,00	99,54	102	100,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Umum	100 Persentase	2.061.935.145	2.033.810.163	98,64	100	100,00
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	70 paket	270.000.000	258.705.400,00	95,82	70	100,00
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 paket	350.000.000	345.145.750,00	98,61	40	100,00
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	22 paket	100.000.000	96.979.500,00	96,98	22	100,00
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan	1 Dokumen	30.000.000	29.920.000,00	99,73	1	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
		Perundang-undangan yang disediakan						
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400 Laporan	1.261.935.145	1.259.319.513,00	99,79	400	100,00
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	500 Dokumen	50.000.000	43.740.000,00	87,48	500	100,00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD	100 Persentase	768.606.000,00	751.254.000,00	97,74	100	100,00
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	46 Unit	768.606.000,00	751.254.000,00	97,74	46	100,00
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	100 Persentase	1.915.262.822	1.732.427.460	90,45	100	100,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.450.500	7.478.500,00	71,56	2	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	135.000.000	106.071.051,00	78,57	12	100,00
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	209.480.000	204.706.940,00	97,72	3	100,00
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.560.332.322	1.414.170.969,00	90,63	12	100,00
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	100 Persentase	322.850.000	314.600.730	97,44	100	100,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	48 unit	263.620.000	257.522.730,00	97,69	48	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60 unit	59.230.000	57.078.000,00	96,37	60	100,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)	640 Proyek	1.000.000.000	999.081.840,00	99,91	1703	266,09
2.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Invrstasi	3 Dokumen	1.000.000.000	999.081.840,00	99,91	3	100,00
2.1.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.000.000.000	999.081.840,00	99,91	3	100,00
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	260 Investor	1.295.494.400	1.286.579.471,00	99,31	284	109,23
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Industri/Hilirisasi	260 Investor	1.295.494.400	1.286.579.471,00	99,31	284	109,23

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	2 Dokumen	300.000.000	298.969.600,00	99,66	2	100,00
3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	995.494.400	987.609.871,00	99,21	4	80,00
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin	1000 Izin	1.250.000.000	1.148.907.057	91,91	11654	1165,40
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	88 Nilai	1.250.000.000	1.148.907.057	91,91	89,35	101,53

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	300.000.000	283.066.926,00	94,36	2000	100,00
4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	300 Kegiatan Usaha	650.000.000	578.760.000,00	89,04	300	100,00
4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	100 Orang	200.000.000	188.018.131,00	94,01	100	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
4.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Kegiatan Usaha	100.000.000	99.062.000,00	99,062	12	100,00
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Invetasi	30,47 Persentase	1.681.700.000	1.433.987.529	85,27	30,47	100,00
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	550 Pelaku Usaha/Kegiatan	1.681.700.000	1.433.987.529	85,27	550	100,00
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan usaha	350.000.000	288.975.536,00	82,56	100	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha	935.718.800	859.917.561,00	91,90	300	100,00
5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan usaha	395.981.200	285.094.432,00	72,00	100	100,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi	15 Aplikasi	6.030.445.366	5.521.091.860,00	91,55	15	100,00
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Maintance Aplikasi	15 Aplikasi	6.030.445.366	5.521.091.860,00	91,55	15	100,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Realisasi Fisik	% Fisik
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	4436 Dokumen	6.030.445.366	5.521.091.860,00	91,55	4436	100,00
		JUMLAH		26.734.438.040	24.992.440.144	93.48%		

BAB IV PENUTUP

I. Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal 164,31% dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 rata-rata sebesar (**Sangat Tinggi**), dengan realisasi investasi menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan total nilai **Rp16,415 triliun**, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar **Rp7,4 triliun**. Hal ini mencerminkan daya tarik investasi yang tinggi dan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di daerah.

Namun nilai investasi yang masuk mengalami lonjakan signifikan berbanding terbalik dengan pertumbuhan investasi, pertumbuhan investasi pada tahun 2024 hanya mencapai **10,85%**, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar **30,60%**. Perlambatan pertumbuhan ini menunjukkan bahwa meskipun investasi meningkat secara absolut, laju pertumbuhannya masih tertahan, adapun kinerja indikator dapat dilihat sebagai berikut:

1) Capaian kinerja untuk indikator Kinerja Ke-1 Tahun 2024

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2024 capaian kinerja Nilai realisasi investasi sebesar 16,415 Triliun Rupiah dengan pertumbuhan investasi sebesar 10,85% atau capaian kinerja sebesar 223,33% (*Sumber Data: LKPM, Aplikasi NSWI, Koordinator Penanaman Modal*). Pencapaian Tingkat Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun mengalami *fluktuatif* hal ini disebabkan karena :

- *Fluktuatif* Harga Komoditas dimana Kabupaten Kutai Kartanegara masih Ketergantungan pada sektor pertambangan dan energi menyebabkan volatilitas investasi ketika harga batu bara dan minyak turun.

- Krisis Ekonomi Global dimana ekonomi dunia mengalami perlambatan yang mempengaruhi arus modal masuk ke Indonesia termasuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Regulasi Lingkungan yang Ketat menyebabkan beberapa industri besar yang bergerak pada sektor tambang dan industri mengalami kendala terkait perizinan lingkungan.
 - Ketimpangan Infrastruktur di Wilayah Tertentu dimana beberapa kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur penting. Serta telah berjalannya proyek-proyek investasi pada tahun-tahun sebelumnya
- Persaingan dengan Daerah Lain yang telah mempunyai kawasan industri atau sentra- sentra industri yang lebih berkembang daripada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Disamping Kendala yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara juga terdapat faktor-faktor pendorong Realisasi investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

- Peningkatan Infrastruktureseperti Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas industri yang terus dikembangkan mendorong investasi baru.
- Diversifikasi Sektor Investasidimana Sektor non-ekstraktif seperti pariwisata, industri manufaktur, dan jasa mulai berkembang sebagai alternatif dari ketergantungan pada sektor pertambangan.
- Kondisi Ekonomi Makro yang Stabil membuat Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah-daerah yang potensia.
- Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Pemerintah daerah aktif dalam menarik investor dengan berbagai program investasi strategis.

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2024 sebesar 88,25 dan realisasinya 92,91 atau capaian kinerja sebesar 105,28% (*sumber data: Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu*). Target kinerja

melebihi target dengan kriteria penilaian Sangat tinggi, Terdapat peningkatan sebesar 0,95 dibandingkan dengan IKM tahun 2023. Pengukuran kepuasan Masyarakat (SKM) berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan paramater untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh organisasi selaku penyedia jasa layanan. Berdasarkan pengukuran tingkat kepuasan pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pada tahun 2024 ini, IKM Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada Kategori A (Sangat Baik). Hasil pengukuran kepuasan masyarakat pada 3 tahun terakhir sejak tahun 2022 menunjukkan tren yang baik (meningkat). Pada tahun 2022 nilai SKM sebesar 91,35, tahun 2023 sebesar 91,96 dan tahun 2024 sebesar 92,91.

Pengukuran ini dilakukan pada layanan publik yang disediakan/diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengukuran dilakukan pada 9 unsur yang oleh Kementerian PAN dan RB telah ditetapkan sebagai parameter dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Setiap unsur diukur dengan 1 (satu) pertanyaan dengan pilihan jawaban tentang preferensi responden berdasarkan pengalaman mengakses layanan publik. Melalui cara ini maka dapat diperoleh gambaran penilaian masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara atas layanan publik yang pernah mereka terima.

Capaian kinerja tahun 2024 **meningkat dari tahun sebelumnya**, dimana pada tahun 2024 capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 164,31% dan pada tahun sebelumnya (Tahun 2023) capaian kinerjanya sebesar 155,24% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 17,65%.

II. Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan penggunaan Ilmu Teknologi (IT);
- 3) Mendorong Terbentuknya Kawasan industry ataupun sentra-sentra industry di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 4) Pengendalian Penanaman Modal menuju Hilirisasi Sumber Daya Alam terutama *Green Investment* dan *Blue Investment*;
- 5) Menyelesaikan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal dan membuat Peraturan Bupati (PERBUP) serta membuat Standar Operasional Prosedur tentang pemberian Fasilitas/ insentif penanaman modal
- 6) Membuat kajian Investasi berstandar IPRO (*Investment Project To Over*) untuk menarik minat Penanaman Modal terutama pada bidang yang diunggulkan pada RPJMD yaitu Pertanian dalam arti luas, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, Februari 2025

Kepala

Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kutai Kartanegara,



ALFIAN NOOR, SE., M. LING.

Pembina Utama Muda- IV/c

NIP. 19690113 199503 1 005



LKJIP 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
GEDUNG D LANTAI DASAR